

**PENGARUH FAKTOR POLITIK TERHADAP *DISCRETIONARY*  
*ACCRUALS* PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**HILDA RATNA DEWI  
NPM 1911031022**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### PENGARUH FAKTOR POLITIK TERHADAP *DISCRETIONARY ACCRUALS* PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Oleh  
Hilda Ratna Dewi

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris bahwa terdapat praktik *discretionary accruals* pada pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu juga untuk memperoleh bukti empiris bahwa faktor politik mempengaruhi pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan praktik *discretionary accruals*. Penelitian ini menggunakan analisis data panel *random effects model* (REM) sebagai alat analisis hipotesis dengan menggunakan *software Eviews 10*. *Discretionary Accruals* merupakan proksi yang digunakan dalam mengukur manajemen laba pada Pemerintah Daerah di Indonesia dan diestimasi dengan menggunakan *Modified Jones Model*. Hasil penelitian menunjukkan Kepala Daerah Petahana (*Incumbent*) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *discretionary accruals* pada pemerintah daerah provinsi yang ada di Indonesia. Jadi, *discretionary accruals* pada pemerintah daerah dengan kepala daerah petahana (*incumbent*) lebih tinggi dibandingkan pada daerah dengan kepala daerah yang baru pertama kali dipilih. Semakin banyak kepala daerah petahana provinsi di Indonesia maka *discretionary accruals* semakin meningkat. Sedangkan Tahun Pilkada tidak memiliki pengaruh terhadap *discretionary accruals* pada pemerintah daerah provinsi yang ada di Indonesia sehingga  $H_0$  tidak ditolak. Kenaikan/penurunan *discretionary accruals* yang terjadi pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia tidak dipengaruhi oleh tahun pilkada.

**Kata kunci:** *Discretionary Accruals, Incumbent, Tahun Pilkada, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)*

## **ABSTRACT**

### ***POLITICAL FACTORS ON DISCRETIONARY ACCRUALS OF LOCAL GOVERNMENTS IN INDONESIA***

***By***

**Hilda Ratna Dewi**

*This research aims to collect empirical data that there is a practice of discretionary accruals of local governments in Indonesia. Furthermore, the aim is to collect empirical evidence that political factors influence Indonesian local governments' employing discretionary accruals approach. This study uses panel random effects model (REM) panel data analysis as a hypothesis analysis tool using Eviews 10 software. Discretionary Accruals is a proxy used in measuring earnings management in Local Governments in Indonesia and is estimated using the Modified Jones Model. The results showed that the Incumbent Regional Head (Incumbent) has a significant positive effect on discretionary accruals in provincial local governments in Indonesia. So, discretionary accruals in local governments with incumbent regional heads are higher than in regions with newly elected regional heads. The more incumbent provincial heads in Indonesia, the more discretionary accruals increase. Meanwhile, the election year has no effect on discretionary accruals in provincial local governments in Indonesia so that  $H_0$  is not rejected. The increase/decrease in discretionary accruals that occurs in provincial local governments in Indonesia is not influenced by the election year.*

***Keywords: Discretionary Accruals, Incumbent, Election Year, Financial Statements of Local Government***

**PENGARUH FAKTOR POLITIK TERHADAP *DISCRETIONARY ACCRUALS*  
PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

Oleh  
**HILDA RATNA DEWI**

**Skripsi**  
**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**  
**Sarjana Akuntansi**

**Pada**  
  
**Jurusan Akuntansi**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**BANDAR LAMPUNG**

**2023**

**Judul Skripsi** : **PENGARUH FAKTOR POLITIK  
TERHADAP *DISCRETIONARY ACCRUALS*  
PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

**Nama Mahasiswa** : **Hilda Ratna Dewi**

**No. Pokok Mahasiswa** : **1911031022**

**Jurusan** : **Akuntansi**

**Fakultas** : **Ekonomi dan Bisnis**

**MENYETUJUI**

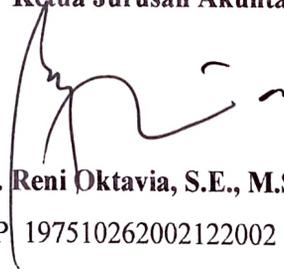
**1. Komisi Pembimbing**



**Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.**

**NIP. 197506202000122001**

**2. Ketua Jurusan Akuntansi**



**Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt.**

**NIP. 197510262002122002**

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.**

  
.....

Penguji I : **Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.**

  
.....

Penguji II : **Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA.**

  
.....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**

NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **07 Desember 2023**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

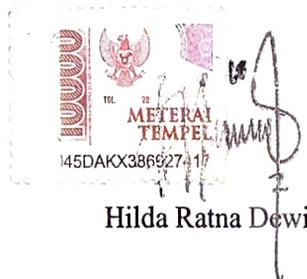
**Nama : Hilda Ratna Dewi**

**NPM : 1911031022**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Faktor Politik Terhadap *Discretionary Accruals* pada Pemerintah Daerah di Indonesia” telah ditulis sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Desember 2023

Penulis



Hilda Ratna Dewi

## RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini bernama Hilda Ratna Dewi, lahir di Pajar Bulan pada tanggal 17 Januari 2001 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari Bapak Ratna Kusuma dan Ibu Israwati. Penulis memiliki dua orang adik bernama Assifa Ratna Nabila dan Muhammad Rafiandra Kusuma.

Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 4 Fajar Bulan pada tahun 2007 – 2013, lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 1 Way Tenong pada tahun 2013 - 2016, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMKN 1 Way Tenong pada tahun 2016 - 2019. Pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi ROIS FEB Unila, EBEC FEB Unila, EEC FEB Unila, KSPM FEB Unila, Birohmah Unila, DPM U KBM Unila, dan IKAM Lampung Barat. Penulis menjabat sebagai Sekretaris Departemen Akademik dan Riset pada ROIS FEB Unila periode 2020, Sekretaris Departemen PSDM ROIS FEB Unila periode 2021, Sekretaris Departemen Koordinator Kampus IKAM Lambar periode 2021, Sekretaris Departemen Pendidikan dan Kerohanian IKAM Lambar periode 2022, dan Bendahara Umum IKAM Lambar periode 2023.

Selama berorganisasi, penulis menjalankan berbagai macam kepanitiaan dan pernah menjalankan amanah sebagai panitia PDD pada KMB In Action Birohmah Unila tahun 2019, sekretaris pelaksana pada kegiatan Kahfi In Action (KIA) ROIS FEB tahun 2019, PJ Debat Divisi Acara Panitia Khusus (Pansus) dalam Pemilihan Raya (Pemira) Unila tahun 2020, *Steering Committee* (SC) pada berbagai kegiatan kepanitiaan di tahun-tahun setelahnya seperti SC Konsumsi pada kegiatan Bina Desa IKAM Lambar tahun 2021 dan SC Acara pada kegiatan Bina Desa IKAM Lambar tahun 2022. Selain itu, penulis juga aktif menjadi asisten dosen pada mata kuliah Pengantar Akuntansi, *Corporate Governance* dan Analisis Laporan Keuangan tahun 2022-2023. Penulis juga mengikuti kegiatan magang, pada Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2023.

## **PERSEMBAHAN**

### **Alhamdulillahirabbilamin**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

**Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini untuk :**

**Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Ratna Kusuma dan Ibunda Israwati**  
Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tidak terbatas. Terimakasih atas segala usaha dan doa yang telah diberikan untuk mencapai impianku dan senantiasa memberikan nasihat dan saran kepadaku. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan baik di dunia dan akhirat,

Aamiin

**Adik-adikku tersayang, Assifa Ratna Nabila dan Muhammad Rafiandra Kusuma**  
Terima kasih telah mendukung dan memberikan doa serta dukungan, semoga Allah memberikan balasan yang sesuai bahkan lebih baik.

**Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku**  
Terima kasih atas doa, bantuan, dan dukungannya.

**Almamaterku tercinta, Universitas Lampung**

## **MOTTO**

*“Segala sesuatu dapat dilakukan, asalkan tidak menyalahi aturan.”*

**(Hilda Ratna Dewi)**

*“Segala sesuatu itu bisa karena biasa, dan biasa karena bisa”*

**(Ayah)**

*“Biarlah orang berkata apa, selalu percaya lah bahwa kita pasti bisa”*

**(Mamah)**

*“Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan*

*Allah. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.”*

**(Q.S. Ar-Rum, 30 : 29)**

## SANWACANA

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Faktor Politik Terhadap *Discretionary Accruals* pada Pemerintah Daerah di Indonesia”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak yang memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas perhatian serta bantuannya;
2. Ibu Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama. Ibu Dr. Agrianti Komalsari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan serta Bapak Muslimin, S.E., M.Sc., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas perhatian serta bantuannya;
3. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas perhatian dan bantuannya;

4. Ibu Liza Alvia, S.E.,M.Sc., Akt., CA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas perhatian dan bantuannya.
5. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan penuh perhatian dan kesabaran serta memberikan kritik dan saran yang membangun selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si., selaku dosen pembahas utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA., selaku Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
8. Bapak Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., CA, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga bagi penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi S1 Akuntansi.
10. Seluruh staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu, baik selama masa perkuliahan maupun masa penyusunan skripsi. Terima kasih atas segala bantuan dan kesabaran yang telah diberikan.
11. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ratna Kusuma dan Ibu Israwati. Terimakasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan, perhatian, dan atas

segala hal yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kelak penulis dapat memberikan kebahagiaan dan terus menjadi kebanggaan serta menjadi anak yang berbakti.

12. Kedua adikku, Assifa Ratna Nabila dan Muhammad Rafiandra Kusuma, terima kasih karena terus memberikan dukungan dan doa. Semoga kelak penulis dapat membalas kebaikanmu.
13. Keluarga besarku, Mak Ngkung, Emih, Mak Udin, Mamah Ati, Mamah dan Bapak Iya, Mamah dan Bapak Uni, Mang Idin dan Bibi Egi, Mang Nana dan Bibi Engkas, Mang Asep dan Bibi Tia serta kakek, nenek, uwa, paman, tante, dan sepupu yang tidak bisa disebutkan semua, terima kasih atas doa, dukungan, dan nasihat untuk masa perkuliahanku.
14. Feno Rega Bagus Pramudya, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Terima kasih telah menjadi rekan yang baik dalam melewati proses panjang dan selalu menemani penulis di setiap proses selama masa perkuliahan.
15. Sahabatku, Nani, Kartika, Ingrid, Rida, Dali, Annisa, Herlina, Mayang, Asti, Isna, Bella, Sawaliya dan Salma yang selalu mendukungku meskipun terpisah jarak. Penulis berharap kalian selalu dikelilingi oleh kebaikan.
16. Sahabat dan teman perjuanganku, Cika dan Amal yang sentiasa menemaniku terutama selama proses penyusunan skripsi ini. Teman-teman ROIS dan IKAM Lambar yang telah banyak memberikan pengalaman, dukungan, motivasi, dan sudah berjuang bersama. Terimakasih telah banyak membantu serta memberikan doa, dukungan, dan banyak hal yang diberikan. Karena kalian, masa perkuliahanku menjadi lebih berwarna. Semoga hal baik selalu mengiringi kalian, dimanapun kalian berada nantinya.

17. Seluruh teman-teman Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Pembangunan 2019. Terima kasih telah kebersamai dan saling memberikan dukungan selama masa kuliah, dan semoga sukses untuk kalian semua.
18. Teman-teman seperbimbingan skripsi, Putu Ria Septiani dan Amalia Rahma Putri. Terima kasih telah kebersamai dan saling memberikan dukungan selama masa kuliah, semoga hal baik terus mengiringi kalian dimanapun kalian berada.
19. Seluruh teman-teman Bidikmisi FEB Angkatan 2019, terimakasih sudah berjuang bersama sampai saat ini.
20. Bunda Agri, Cece Olin, Mas Apis, Uwak Udin, Om Epi, Aunty Leny dan Mba Piai yang menemani hari-hari penulis di akhir-akhir masa perkuliahan, terima kasih sudah selalu menghibur dan memberi arahan serta pelajaran kepada penulis dengan sabar dan bijaksana. Penulis berharap kebahagiaan selalu mengelilingi kita semua.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan masukan serta inspirasi bagi penulis, suatu kebahagiaan telah dipertemukan dengan kalian semua.
22. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 11 Desember 2023

Penulis,



**Hilda Ratna Dewi**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Public Choice Theory .....	10
2.1.2 Agency Theory .....	11
2.1.3 Discretionary Accruals .....	13
2.1.4 Faktor Politik.....	15
2.2 Penelitian Terdahulu .....	16
2.3 Kerangka Pemikiran .....	21
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	21
2.4.1 Pengaruh Kepala Daerah Petahana (Incumbent) Terhadap Discretionary Accruals.....	21
2.4.2 Pengaruh Tahun Pilkada Terhadap Discretionary Accruals.....	24
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	26
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian .....	26
3.3 Definisi Variabel .....	28
3.3.1 Variabel Terikat (Y) .....	28
3.3.2 Variabel Bebas (X).....	28
3.4 Pengukuran Variabel .....	29
3.5 Metode Analisis Data .....	32
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	32
3.5.2 Metode Pemilihan Model .....	32

3.5.3	Uji Spearman dan Pearson .....	33
3.5.4	Analisis Regresi Data Panel .....	34
3.5.5	Uji Hipotesis .....	36
<b>IV.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1	Deskripsi Objek Penelitian .....	38
4.2	Analisis Data .....	38
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	38
4.2.2	Metode Pemilihan Model .....	40
4.2.3	Uji Korelasi Pearson dan Spearman .....	41
4.2.4	Analisis Regresi Data Panel .....	42
4.2.5	Uji Hipotesis .....	43
4.3	Pembahasan .....	45
4.3.1	Pengaruh Kepala Daerah Petahana (Incumbent) terhadap Discretionary Accruals (DA) .....	45
4.3.2	Pengaruh Tahun Pilkada terhadap Discretionary Accruals (DA) .....	47
<b>V.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>50</b>
5.1	Kesimpulan.....	50
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	51
5.3	Saran.....	51
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>59</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... 21

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 3.1	Pemilihan Kepala Daerah Provinsi di Indonesia.....	26
Tabel 3.2	Pengukuran Variabel.....	29
Tabel 4.1	Hasil Penentuan Sampel.....	32
Tabel 4.2	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	32
Tabel 4.3	Hasil Uji Chow.....	34
Tabel 4.4	Hasil Uji Hausman .....	34
Tabel 4.5	Hasil Uji LM Breusch Pagan .....	35
Tabel 4.6	Hasil Uji <i>Pearson</i> dan <i>Spearman</i> .....	35
Tabel 4.7	Hasil Estimasi Regresi Data Panel <i>Random Effect</i> .....	37
Tabel 4.8	Hasil Uji F.....	37
Tabel 4.9	Hasil Uji t.....	38
Tabel 4.10	Hasil Estimasi Determinasi ( $R^2$ ) .....	38

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Earnings management* merupakan studi pada sektor swasta yang sudah banyak dilakukan. Namun, *earnings management* di sektor publik masih sangat terbatas (Ferreira et al., 2020). Perilaku *earnings management* dapat terjadi dikarenakan banyak faktor penentu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Cohen et al. (2019) salah satu faktor penentu *earnings management* adalah faktor politik terkait yang dapat berupa pemilihan ulang kepala daerah, tahun pemilihan dan pra-pemilihan serta ukuran pemerintah daerah. Akuntansi berbasis akrual dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Dimana pengelolaan angka akuntansi ini dilakukan agar angka surplus/defisit mendekati nol (Pellicer et al., 2016). Di Indonesia, ini disebut dengan nama SiLPA/SiKPA yaitu selisih antara pengeluaran dan pendapatan, jika surplus maka positif dan jika defisit maka negatif. Pengelolaan angka akuntansi ini ditandai dengan adanya akrual yang tidak normal dan bisa disebut sebagai praktik *discretionary accruals*. Informasi yang disajikan cenderung dimanipulasi melalui praktik *discretionary accruals* oleh penyusun laporan keuangan jika mengacu pada perspektif keagenan. Hal ini dilakukan agar sejalan dengan *self-interest* dari penyusun laporan keuangan tersebut. *Self-interest* yang dimaksud dapat berupa pencitraan, mendapatkan bonus, mendapatkan penghargaan atau bahkan menyembunyikan fakta (Bisogno & Donatella, 2021).

Di Indonesia, akuntansi pemerintahan terus mengalami kemajuan dengan diberlakukannya peraturan yang baru mengikuti perkembangan aturan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah. Seiring dengan reformasi *New Public Management* (NPM), desentralisasi fiskal pun ditetapkan di Indonesia sejak tahun 2001 tepatnya pada tanggal 1 Januari. Vinnari & Näsi, (2008) mengatakan PKPD atau Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, mendorong prinsip-prinsip bisnis pada organisasi pemerintahan untuk digunakan tidak terkecuali akrual dalam basis akuntansi. Diawali dengan disahkannya Undang-Undang, tepatnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta UU No. 25 Tahun 1999 tentang PKPD atau Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan akrual dalam basis akuntansi yang diterapkan, diharapkan bisa memberi pandangan yang beragam akan keuangan publik dengan memasukkan dimensi-dimensi keuangan yang mengungkapkan kondisi keuangan dan kinerja keuangan entitas sektor publik (Hyndman & Connolly, 2011).

SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah harus selalu menjadi dasar atas perubahan pada bidang akuntansi pemerintah. Pemerintah sebagai entitas baik pusat maupun daerah dalam menyusun laporan keuangannya ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan peraturan daerah. SAP dibuat untuk bisa menjamin keberadaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara diantaranya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas (Putri et al., 2021). Perubahan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Indonesia telah melalui berbagai perkembangan aturan dan kebijakan. Baik pusat maupun daerah sudah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual secara penuh sejak tahun 2015. Bias informasi dan masalah lain pada pemda tentunya akan menjadi dampak dari

peluang praktik manajemen laba (akrual) yang terbuka (Afiqoh, 2020; Lapsley et al., 2009).

Salah satu maksud dari pelaporan keuangan yang utama pada pemerintah daerah diantaranya untuk memberikan sebuah informasi mengenai status dan kondisi finansial (Rivenbark & Roenigk, 2011). Selain itu, Schipper (1989) dan Jansen (2008) juga sepakat bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah juga menggambarkan informasi kinerja keuangan. Peraturan kepala daerah merupakan bentuk dari sistem serta kebijakan akuntansi yang disusun oleh pemda. Fleksibilitas tentu dapat meningkat dalam menentukan besaran angka-angka dalam sajian LKPD disebabkan hal ini. Terutama pada Laporan Operasional (LO) dan Neraca (Handayani et al., 2022). LKPD ini digunakan untuk menunjukkan data kepada pihak internal maupun eksternal sebagai dasar kebijakan dalam mengambil keputusan.

Laporan keuangan sendiri dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 memiliki pengertian sebagai laporan terstruktur mengenai kondisi keuangan serta segala bentuk transaksi yang dijalankan suatu entitas pelaporan. Bertujuan untuk menyediakan informasi guna mengambil keputusan serta media akuntabilitas akan sumber daya lembaga pemerintah yang sudah dipercayakan. LKPD sangat erat kaitannya dengan lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta masyarakat secara umum. Unsur-unsur ini merupakan pihak yang paling berkepentingan dengan LKPD sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas kinerja mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering disingkat sebagai APBD yang tentunya telah

diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK selama periode (tahun) berjalan. Peraturan Daerah (Perda) yang telah mengatur anggaran di dalamnya merupakan “kontrak” antara eksekutif dan legislatif. Dimana eksekutif merupakan Pemerintah Daerah dan legislatif merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi tolak ukur dalam memberikan penilaian atas kinerja pemerintah daerah (Abdullah, 2012).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 58 Tahun 2005 mengenai PKD dinyatakan bahwa kepala daerah sebagai kepala pemerintah daerah merupakan pemegang kuasa untuk mengelola keuangan daerah yang karena jabatannya pula berwenang menyelenggarakan seluruh pengelolaan keuangan daerah. PKD merupakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan kewenangan yang terdapat dalam penyusunan laporan keuangan dalam penggunaan kebijakan akuntansi yang dibolehkan oleh standar memiliki implikasi sehubungan dengan praktik *creative accounting* ataupun *earnings management* (Beck, 2018; Cohen et al., 2019) Utamanya dengan *discretionary accruals* Ferreira et al. (2020). Diskresi yang dilakukan tentunya memengaruhi putusan yang akan diambil pengguna LKPD terutama DPRD yang merupakan lembaga legislatif dengan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan APBD (Abdullah et al., 2021) yang bisa memutuskan atau melakukan penilaian yang salah (keliru) sebagai akibat memanipulasi informasi atau fakta yang ada dalam LKPD. Terlebih DPRD tak mempunyai pengetahuan memadai dalam menganalisis akar maupun implikasi penyebab manipulasi tersebut (Abdullah et al., 2021).

Faktor manajemen yang bersifat oportunistik dapat mempengaruhi kebebasan untuk membuat keputusan (diskresi) terkait akun akrual pada LKPD yang mengarah pada kegiatan menyamarkan pelanggaran atau ketidakpatuhan akan kebijakan akuntansi dengan maksud untuk mempengaruhi pemahaman *stakeholders* serta untuk memaksimalkan sumber daya (Pilcher, 2011) yang menyebabkan terdapat disimetri informasi antara pemerintah daerah dan pengguna LKPD. Oleh karena itu, *discretionary accruals* dapat memungkinkan manajer dan politisi untuk melakukan kebijaksanaan saat melaporkan pelaporan keuangan daerah berupa laporan aset dan kewajiban serta pengakuan pendapatan dan beban. Konsekuensi dari penerapan akuntansi akrual ini membuka jalan bagi penelitian empiris tentang manipulasi akuntansi dan *earnings management* pada sektor publik (Cohen, 2012). Penelitian mengenai *earnings management* telah menjadi topik yang cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut terutama pada sektor publik di Indonesia yang bertujuan untuk memahami peluang dan insentif organisasi sektor publik untuk memanipulasi angka akuntansi.

Dalam hal kepala daerah petahana (*incumbent*), kepala daerah yang baru menduduki jabatan selama 1 periode cenderung memiliki keinginan untuk mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya. Dengan mengasumsikan *earnings management* yang terjadi melalui *discretionary accruals*, kepala daerah diharapkan dapat mengambil hati masyarakat dan membuat citra dirinya semakin baik. Dengan begini, kemungkinan petahana akan terpilih kembali menjadi lebih besar.

Hasil analisis Cohen et al. (2019) memberikan bukti yang kuat mengenai keterlibatan pemerintah daerah dalam manajemen laba dan bahwa manajemen laba dipengaruhi oleh siklus pemilu. Maka dengan ini, faktor politik ikut terlibat menjadi faktor penentu manajemen laba dengan anggapan bahwa kepala daerah cenderung menumbuhkan sikap manajemen laba saat ingin dipilih kembali. Di Indonesia, pesta demokrasi besar-besaran akan terjadi pada tahun 2024 dimana untuk pertama kalinya pemilihan kepala daerah diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia secara bersamaan. Pada UU No. 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa jika kepala daerah yaitu bupati, walikota maupun gubernur ingin mencalonkan diri kembali pada pemilihan berikutnya, maka diwajibkan mengambil cuti selama masa kampanye (reses) jika jabatan belum berakhir. Namun jika jabatan sudah berakhir sebelum masa kampanye, maka kepala daerah akan didemisionerkan. Setelah didemisionerkan atau mengambil cuti, maka kepala daerah tersebut akan digantikan Plt (Pelaksana Tugas) Pjs (Pejabat Sementara) ataupun Penjabat (Pj) sampai masa pemilihan tiba.

Penelitian mengenai *earnings managements* dan *discretionary accruals* yang terjadi di pemerintah daerah sudah banyak dilaksanakan pada beberapa negara diantaranya Australia oleh Pilcher (2011), Finlandia oleh Vinnari & Näsi (2008), oleh Pina et al. (2012) di Inggris. Negara yang sama oleh Arcas & Martí (2016), di Amerika Serikat oleh Beck (2018), di Italia dan Yunani oleh Cohen et al. (2019). Selain itu juga terdapat penelitian di Italia oleh Anessi-Pessina & Sicilia (2020), Donatella (2020) dan di Swedia Donatella & Tagesson (2021), serta Ferreira et al. (2020) di Portugal. Kendati demikian penelitian mengenai *earnings management*

ataupun *discretionary accruals* pada pemerintah daerah masih jarang dilakukan di Indonesia terutama yang melibatkan faktor politik didalamnya. Terdapat juga beberapa penelitian di Indonesia mengenai manipulasi akrual diantaranya oleh Gamayuni (2022); Rohman et al. (2018 dan 2019) dan Rohman (2016). Selain daripada itu, belum terdapat studi yang mengaitkan *discretionary accruals* pada pelaporan keuangan dengan dimensi penggunaan informasi dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan kepala daerah, yang memiliki kepentingan politik sekaligus sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk penentu kebijakan pengelolaan keuangan publik di pemerintahan daerah.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Cohen et al. (2019) dan Ferreira et al. (2020) yang meneliti pengaruh faktor politik pada negara Yunani, Italia dan Portugal terhadap *earnings management* yang diproksikan dengan DA atau *discretionary accruals*. Sedangkan dalam penelitian ini mencari bukti empiris mengenai faktor politik berupa pemilihan kepala daerah petahana (*incumbent*) dan tahun pilkada serta ukuran legislatif. Di Indonesia juga, penelitian mengenai *discretionary accruals* dan faktor penentunya masih sangat terbatas. Sehingga hal ini dapat menjadi *gap research* dan sangat relevan untuk diteliti. Berdasarkan penjelasan ini, maka judul penelitian dapat dirumuskan menjadi **“Pengaruh Faktor Politik Terhadap *Discretionary Accruals* Pada Pemerintah Daerah di Indonesia”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang sudah dideskripsikan, masalah dalam penelitian ini pun dirumuskan dengan:

1. Apakah praktik *discretionary accruals* terjadi pada pemerintah daerah yang ada di Indonesia?
2. Apakah faktor politik yang diprosikan dengan kepala daerah petahana dan tahun pilkada mempengaruhi adanya praktik *discretionary accruals* pada pemerintah daerah yang ada di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut diatas yang sudah diidentifikasi. Dengan ini, penelitian ini memiliki tujuan berikut :

1. Mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat praktik *discretionary accruals* pada pemerintah daerah di Indonesia.
2. Mendapatkan bukti empiris bahwa faktor politik yang diprosikan dengan kepala daerah petahana dan tahun pilkada mempengaruhi pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan praktik *discretionary accruals*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian yang dilakukan ini adalah memberi kontribusi pada pihak yang memiliki kepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengonfirmasi teori pada penelitian ini yaitu *public choice theory* dan *agency theory*. Selain itu, penelitian ini diharapkan

dapat mengembangkan ilmu dan menambah pengetahuan serta memberikan kontribusi pemikiran peneliti dalam dunia akademisi dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait *discretionary accruals* pada pemerintah daerah (pemda).

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Diharapkan, penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan, evaluasi serta pertimbangan dan referensi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta kebijakan-kebijakan terkait LKPD kedepannya.

### b. Bagi Akademisi

Diharapkan, penelitian ini akan memperkaya literatur guna menjadi sumber inspirasi dan gagasan untuk pengembangan penelitian kedepannya dengan variabel terkait. Tujuannya agar penelitian tidak hanya memberikan manfaat di lingkup ekonomi, tetapi juga mampu bermanfaat pada berbagai bidang lainnya. Di samping itu, harapan dari penelitian ini adalah mampu mewujudkan peran akademisi sebagai *agent of control* yang mampu mengendalikan pemerintah dalam menjalankan peran semaksimal mungkin dengan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Public Choice Theory

*Public choice theory* (teori pilihan publik) memperkenalkan gagasan bahwa proses demokrasi dapat dilihat sebagai pasar yang kompetitif yang agen operatifnya memiliki motivasi egois. Agen operatif yang dimaksud diantaranya adalah politisi, warga negara, pejabat publik dan kelompok kepentingan. Teori ini mengasumsikan bahwa politisi termotivasi untuk memaksimalkan suara untuk pemilihan ulang (Buchanan dan Tullock, 1962). Teori pilihan publik menganalisis dan memetakan perilaku individu (politisi, warga negara, dan lainnya) yang bertindak di sektor publik dengan hasil yang diamati. Dengan ini, teori pilihan publik mencoba menjelaskan dan memahami mengapa orang bertindak dan bagaimana entitas sektor publik beroperasi. Dapat dikatakan bahwa teori pilihan publik mengevaluasi interaksi antara individu dan hasil.

Pendekatan positif yang diambil oleh teori pilihan publik mengemukakan, untuk memaksimalkan suara, seorang politisi termotivasi untuk memanipulasi kebijakan ekonomi demi keuntungan mereka sendiri. Teori pilihan publik menawarkan wawasan mengenai munculnya *discretionary accruals* di sektor publik dan motif politisi serta administrator publik untuk memanipulasi informasi akuntansi. Cara kerja pemerintah daerah dapat digambarkan sebagai industri antara “pembeli” dan “penjual” untuk memudahkan pemahaman mengenai filosofi dan motif dibalik teori ini (Boyne, 1997). Dapat disimpulkan bahwa terdapat konflik kepentingan antara

politisi dan pemangku kepentingan. Hal ini berdasarkan dua aspek penting mengenai teori pilihan publik yaitu aksioma kepentingan pribadi dan tekanan persaingan. Politisi akan mengejar kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan publik berdasarkan aksioma kepentingan pribadi namun politisi juga termotivasi untuk bertindak demi kepentingan publik karena adanya persaingan politik.

Konflik kepentingan sejalan dengan asimetri informasi yang menciptakan lahan bagi politisi untuk melakukan praktik *discretionary accruals* karena pihak yang berkepentingan disini yaitu politisi dan warga negara selaku pemegang hak suara akan mencoba memuaskan kepentingan masing-masing. Informasi akuntansi adalah faktor kunci yang berkontribusi terhadap pencapaian kepentingan baik politisi maupun pemilih (Guarini, 2016) dimana politisi akan mengejar pemilihan ulang, pemilih akan secara cermat mengawasi tindakan politisi untuk menilai apakah pencapaian tujuan kesejahteraan sosial telah terwujud. Studi yang dilakukan pada teori pilihan publik juga telah mengkonfirmasi adanya siklus anggaran politik di pemerintah daerah untuk mempromosikan pemilihan ulang (Ferreira et al., 2013).

### **2.1.2 Agency Theory**

*Agency theory* (teori agensi) dikemukakan oleh (Jensen dan Meckling, 1976) yang memperkenalkan gagasan hubungan kerja antara *principal* dan *agent*. *Agent* yang dimaksud adalah yang menerima wewenang dan *principal* merupakan pihak yang memberi wewenang. Wujud relasi keagenan ini bisa digambarkan seperti hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat (Arifianti et al., 2013). Dalam

hubungan keagenan, setiap yang berkepentingan akan mengambil tindakan yang dibuat untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Melalui peningkatan belanja publik, politisi dapat memperoleh hak suara pemilih, sementara kenaikan pajak yang terjadi diasumsikan akan membuat politisi kehilangan hak suara pemilih tersebut. Dengan demikian, terdapat kecenderungan untuk menghasilkan anggaran dengan defisit dan bagi politisi untuk terlibat dalam siklus ekonomi politik yang ditandai dengan peningkatan belanja publik pada periode sebelum pilkada dan diikuti oleh tekanan inflasi dan kebijakan restriktif pada tahun setelah pilkada, dalam rezim demokrasi (Ferreira et al., 2013).

Teori keagenan merupakan pendekatan standar yang digunakan untuk mempelajari manajemen laba (Walker, 2013) dimana teori ini menyoroti potensi konflik kepentingan dan ketidakseimbangan informasi antara pelaksana (*agent*) dan pemilik (*principal*). Asumsi dasar teori ini pada dasarnya sama baik untuk sektor swasta maupun sektor publik, meskipun kompleksitasnya meningkat karena beberapa tujuan nirlaba dan banyak lapisan hubungan agensi antara pemilih dan politisi (Zimmerman, 1977). Menurut teori keagenan, informasi akuntansi digunakan baik oleh politisi (manajer), sebagai cara untuk membuktikan kinerja mereka sendiri, dan peserta lokal dalam proses politik (warga negara/pemilih/simpatian) untuk memantau tindakan politik (Maher dan Keller, 1979).

Ferreira et al. (2020) mendukung hipotesis dengan teori agensi, dan berasumsi bahwa politisi termotivasi untuk terlibat dalam manajemen laba melalui upaya

membuktikan tingkat kompetensi yang unggul dengan tujuan dalam rangka pemilihan ulang. Dalam hal ini, politisi secara umum memanipulasi informasi akuntansi melalui *discretionary accruals* (manajemen laba) untuk menunjukkan kompetensinya dalam mengelola sumber daya publik pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, dengan adanya konflik kepentingan antara politisi dan prinsipal, dapat dikatakan bahwa politisi memiliki motivasi yang cukup untuk terlibat dalam *discretionary accruals* pada LKPD.

### **2.1.3 Discretionary Accruals**

Penelitian mengenai *Discretionary Accruals* (DA) dan/atau *Earnings Management* (EM) sudah mulai diadopsi pendekatan teoritisnya oleh peneliti publik. Dechow et al. (2010) dan Jones (2011a) menggunakan metode yang berbeda untuk menyelidiki topik ini dan menggunakannya pada sektor publik. Pemerintah diberikan keleluasaan dalam hal diskresi penerapan akrual dalam akuntansi yang dimaksudkan untuk membuat manajemen lebih mudah dalam menyiapkan laporan finansial (Watts & Zimmerman, 1978). Keadaan atau perkembangan politik dan ekonomi juga memacu pemerintah untuk beralih ke basis akrual dalam akuntansi (Rohman et al., 2018).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan Nomor 217/PMK.05/2015 menyatakan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) selaku entitas akuntansi dan pelaporan, di setiap proses penyusunan laporan keuangannya telah menerapkan metode akrual. Badan Layanan Umum (BLU) adalah bagian dari sektor pemerintah baik daerah maupun pusat yang mengelola aset negara atau daerah tanpa pemisah.

Akuntansi yang dicatat dengan basis akrual merupakan pencatatan yang mendasarkan peristiwa (transaksi) ekonomi yang telah terjadi, meskipun kas belum diterima atau dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ini dapat memunculkan kewajiban di masa depan meskipun beban dikenakan di masa kini atau sekarang. Dengan menggunakan basis akrual dalam aspek-aspek laporan keuangan berupa aset, kewajiban, pendapatan dan beban serta aspek yang lain, kita dapat mengidentifikasi sejauh mana metode akrual diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

*Discretionary accruals* adalah kebijakan mengenai akuntansi yang memberi fleksibilitas pada manajemen dalam menentukan atau mengukur jumlah transaksi akrual dengan bebas atau leluasa. Metode ini dalam kata lain, memberikan kesempatan pada manajemen untuk mengubah atau memperbaiki surplus (defisit) selaras dengan keinginan atau harapan manajemen pemda. Secara konseptual, *discretionary accruals* berarti akrual dengan nilai yang disesuaikan oleh manajemen dalam kebijakan (diskresi). Hal ini pula, dipandang mempunyai korelasi atau hubungan terstruktur dengan faktor lain seperti total akrual, pendapatan piutang maupun aset tetap (PPE) pada pemerintah daerah. Tujuan akhir dari *discretionary accruals* adalah untuk memanipulasi angka laba (manajemen laba) pada sektor *private*, sementara di sektor publik bisa dikatakan sebagai pendekatan agar surplus (defisit) mendekati nol.

Penggolongan laporan pendapatan pemerintah daerah melibatkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Laporan Realisasi

Anggaran merupakan pos pendapatan dimana semua penerimaan yang masuk ke dalam kas umum pemerintah dan menyebabkan peningkatan saldo anggaran di tahun anggaran tertentu, yang merupakan hak pemerintah dan tidak perlu dikembalikan. Sedangkan Laporan Operasional merupakan penambah ekuitas dalam periode anggaran dan merupakan hak pemerintah daerah yang diakui. LRA diakui dengan menggunakan basis kas dimana pencatatan dilakukan saat kas masuk atau keluar. Sedangkan LO diakui berdasarkan basis akrual. *Discretionary accruals* yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan berbagai motif sebagaimana telah dijelaskan pada teori pilihan publik dan teori keagenan.

#### **2.1.4 Faktor Politik**

Faktor politik pada penelitian ini diproksikan dengan kepala daerah *incumbent* dan tahun pilkada. Faktor politik merupakan hal-hal politik yang berdampak pada laporan keuangan pemerintah daerah. Meskipun terdapat faktor politik lain yang berhubungan dengan kinerja pemerintah, namun kepala daerah dan tahun pilkada merupakan faktor politik yang berkaitan paling erat dengan LKPD. Selain itu, proksi ini juga terukur serta data yang digunakan bisa didapatkan dengan jelas.

Kepala daerah cenderung mencalonkan diri kembali pada pemilihan berikutnya, baik itu di daerah tersebut ataupun di daerah lain. Hal ini terjadi karena di UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 60 dijelaskan bahwasannya masa jabatan kepala daerah berlangsung selama 5 tahun baik itu bupati, walikota maupun gubernur serta tentunya bisa dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan pada jabatan yang sama. Peluang kemenangan lebih tinggi daripada kandidat lain dalam pemilihan berikutnya dimiliki kepala daerah petahana (*incumbent*).

Faktor politik memainkan peran yang cukup krusial dalam menganalisis praktik *discretionary accruals* dalam pemerintah daerah. Terutama ketika berlangsungnya pilkada dan terdapat calon kepala daerah petahana (*incumbent*). Di Indonesia, pilkada dilaksanakan pada tahun yang sama (fenomena nasional) namun dengan daerah yang bervariasi. Dengan kata lain, tidak serentak secara keseluruhan dari sabang sampai merauke pada tahun yang sama melainkan berbeda-beda. *Discretionary accruals* (DA) atau proksi dari manajemen laba ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya tahun pemilihan, tahun pra-pemilihan, masa jabatan kepala daerah serta ukuran pemerintah daerah (Cohen et al., 2019). Kepala daerah petahana (politisi) cenderung melakukan praktik *discretionary accruals* sebagai kepentingan relatif implikasi kebijakan yang muncul saat pemilu terjadi. Baik sebelum, sesudah pemilihan maupun pada tahun pemilihan tersebut.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sandra Cohen, Marco Bisogno dan Ioanna Malkogianni (2019).	<i>Earnings management in local government: the role of political factors.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Terdapat hubungan terbalik antara laba sebelum <i>discretionary accruals</i> dan <i>discretionary accruals</i>.</li> <li>– Manajemen laba lebih besar di kota dimana kepala daerah dipilih kembali (<i>incumbent</i>) daripada di kota dimana walikota dipilih untuk pertama kalinya.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tahun pemilu dan tahun pra-pemilu dapat mempengaruhi keberadaan perilaku manajemen laba.</li> </ul>
2	Augusta Ferreira, João Carvalho dan Fátima Pinho (2013)	<i>Earnings management around zero : a motivation to local politician signalling competence.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Untuk menunjukkan kompetensi mereka yang tinggi, politisi lokal mencoba mengelola pendapatan sedemikian rupa untuk melaporkan pendapatan positif mendekati nol.</li> <li>– Manajemen laba dicapai melalui praktik akuntansi.</li> <li>– Politisi lokal yang menghadapi persaingan yang ketat cenderung melaporkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada persaingan yang lebih lemah.</li> </ul>
3	Augusta Ferreira, João Carvalho dan Fátima Pinho (2020)	<i>Political competition as a motivation for earnings management close to zero: the case of Portuguese municipalities.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Untuk menunjukkan kompetensi mereka yang tinggi, politisi lokal mencoba mengelola pendapatan sedemikian rupa untuk melaporkan pendapatan positif mendekati nol.</li> <li>– Manajemen laba dicapai melalui praktik akuntansi.</li> <li>– Politisi lokal yang menghadapi persaingan yang ketat cenderung melaporkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada persaingan yang lebih lemah.</li> </ul>

4	Isabel Maria Garcia-Sanchez, Noemi Mordan dan Beatriz Cuadrado-Ballesteros (2014)	<i>Do electoral cycles affect local financial health?</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mengonfirmasi adanya siklus pemilu dalam kaitannya dengan kesehatan keuangan pemerintah daerah.</li> </ul>
5	Pierre Donatella (2019)	<i>Is political competition a driver of financial performance adjustments? An examination of Swedish municipalities.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Penyesuaian kinerja keuangan yang dilaporkan meningkat seiring dengan persaingan politik jika ada pemerintahan mayoritas.</li> </ul>
6	Enrico Guarini (2016)	<i>The day after: newly-elected politicians and the use of accounting information.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Politisi pemerintah daerah Italia menggunakan informasi akuntansi untuk mempengaruhi opini publik dan untuk memenangkan keuntungan politik setelah pemilu ketika telah terjadi perubahan partai yang berkuasa.</li> </ul>
7	Handayani, Darwanis, dan Syukriy Abdullah (2022)	Determinan manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ukuran pemerintah dan tekanan fiskal memiliki efek negatif pada manipulasi akrual.</li> <li>– Ukuran legislatif berdampak positif pada manipulasi akrual.</li> <li>– Manipulasi akrual tidak dipengaruhi oleh kapasitas fiskal.</li> </ul>

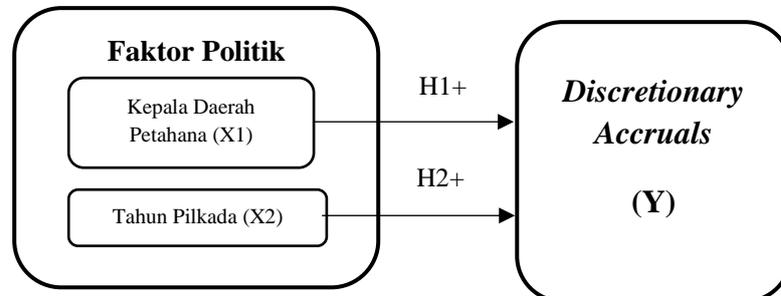
8	Media Kusumawardani (2012)	Pengaruh <i>size</i> , kemakmuran, ukuran legislatif, <i>leverage</i> terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Size</i> memberikan pengaruh pada kinerja keuangan pemda.</li> <li>– Kemakmuran tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemda.</li> <li>– Ukuran legislatif mempengaruhi kinerja keuangan.</li> <li>– <i>Leverage</i> tidak mempengaruhi kinerja keuangan.</li> </ul>
9	Abdul Rohman, Rochmawati Daud dan Arista Hakiki (2021)	Pengaruh <i>financial distress</i> , <i>idle cash</i> , dan opini laporan keuangan terhadap pengelolaan SiLPA pemerintah daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Financial distress ratio</i> berpengaruh positif terhadap manajemen SiLPA.</li> <li>– <i>Idle cash</i> (SiLPA) memiliki efek positif terhadap manajemen SiLPA.</li> <li>– Opini laporan keuangan memiliki efek positif pada manajemen SiLPA.</li> </ul>
10	Rindu Rika Gamayuni (2022)	<i>Motivation and abnormal accrual characteristics on financial statements of local governments in Indonesia.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ada hubungan positif dan signifikan antara <i>abnormal accruals</i> dengan surplus deficit pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.</li> <li>– Dengan motif pemberian informasi kinerja keuangan yang efektif dan efisien, pengelolaan data akuntansi (<i>abnormal accruals</i>) pada LKPD agar nilai surplus-defisit mendekati nol.</li> <li>– Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara AA</li> </ul>

			dan AA untuk piutang, hutang dan leverage.
11	Fitra Dharma, Akhmad Syakhroza dan Dwi Martani (2022)	<i>Does the Social Assistance Budget Realization Affect Incumbents' Votes? (Study in Indonesian Local Election)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Realisasi anggaran bansos berpengaruh positif terhadap suara petahana di pemilihan kepala daerah di Indonesia.</li> <li>– Persaingan politik melemahkan pengaruh anggaran bantuan sosial terhadap suara petahana.</li> </ul>
12	Fitra Dharma (2023)	<i>Regional Heads' Discretionary Spending in Local Government</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pilkada dengan kepala daerah yang ikut berpartisipasi berdampak positif terhadap peningkatan belanja bantuan sosial.</li> <li>– Pilkada yang diikuti <i>Incumbent</i> berpengaruh positif terhadap peningkatan belanja peralatan dan permesinan pemerintah daerah</li> <li>– Pilkada yang diikuti <i>Incumbent</i> tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan belanja bangunan dan infrastruktur</li> <li>– Pilkada yang diikuti <i>Incumbent</i> berpengaruh positif terhadap peningkatan modal jalan irigasi dan belanja jaringan.</li> </ul>

Sumber: Data diolah oleh penulis dari beberapa referensi penelitian.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Terkait penelitian ini, berikut kerangka pemikiran yang dirumuskan:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Konseptualisasi pengaruh faktor politik dengan proksi dua faktor yaitu kepala daerah petahana dan tahun pilkada terhadap *discretionary accruals* pada daerah yang melakukan pilkada di tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Hubungan positif yang diharapkan dari faktor politik terhadap *discretionary accruals* dapat terjawab saat komponen *discretionary accruals* sudah terdeteksi. Komponen *discretionary accruals* dapat terdeteksi dengan menghitung menggunakan rumus *modified Jones* dimana terdapat akun-akun akrual yang tidak normal.

### 2.4 Pengembangan Hipotesis

#### 2.4.1 Pengaruh Kepala Daerah Petahana (Incumbent) Terhadap Discretionary Accruals

Untuk memahami cara kerja pemerintah daerah terhadap masyarakat, dapat digambarkan sebagai industri antara “pembeli” dan “penjual” (Boyne, 1997). Hal ini sejalan dengan aksioma kepentingan pribadi dan tekanan persaingan dimana politisi akan mengejar kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan publik namun tetap termotivasi untuk bertindak demi kepentingan publik. Dengan dasar

hal ini, disimpulkan bahwa ada konflik atau ketidakselarasan kepentingan antara politisi dengan pemangku kepentingan. Dengan adanya hal ini memungkinkan adanya perilaku *discretionary accruals* yang dipicu oleh kondisi yang memungkinkan.

Berdasarkan teori pilihan publik (*public choice theory*) terdapat konflik kepentingan antara kepala daerah (politisi) dengan pemangku kepentingan seperti warga negara (pemilih) dan anggota legislatif. Didasarkan pada aksioma kepentingan pribadi, politisi akan mengejar kepentingan mereka sendiri dan termotivasi untuk bertindak demi kepentingan publik karena adanya persaingan politik. Teori agensi (*agency theory*) juga mengemukakan adanya korelasi kerja antara *principal* dan *agent*. Hal ini dapat digambarkan seperti hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Kualitas laporan keuangan sangat penting bagi penggunaannya baik kepala daerah maupun pemangku kepentingan. Politisi bersedia menggunakan informasi akuntansi demi kepentingan mereka (Guarini, 2016) untuk mendapatkan dukungan pemilih. Sedangkan pemilih mengidentifikasi hasil kerja politisi khususnya kepala daerah salah satunya dari informasi akuntansi dalam hal kesejahteraan publik/sosial. Dengan demikian terdapat hubungan antara pemilihan ulang dengan *discretionary power* (distorsi) dalam keuangan pemerintah daerah (García-Sánchez et al., 2014).

Kepala daerah petahana (*incumbent*) merupakan kepala daerah yang sedang menjabat, artinya lebih mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya. Terutama petahana yang terpilih kembali atau sudah menjabat pada periode kedua dianggap memiliki posisi yang lebih baik untuk memanipulasi pendapatan untuk memenuhi tujuan mereka (Cohen et al., 2019). Kepala daerah petahana (*incumbent*) memiliki konsekuensi jika SiLPA/SiKPA terlalu tinggi maka akan mengarah pada kinerja mereka yang buruk. Hal ini relevan selama periode tekanan politik. Untuk menghindari hal ini, kepala daerah perlu mencari cara untuk melaporkan SiLPA/SiKPA mendekati nol (Ferreira et al., 2013).

Penelitian oleh (Guarini, 2016) menyatakan bahwa kepala daerah terpilih baik itu petahana (*incumbent*) ataupun kepala daerah yang baru pertama kali dipilih memiliki motif tersendiri dalam menggunakan informasi akuntansi. Salah satunya adalah dalam konteks kepala daerah petahana dengan aksioma kepentingan pribadi dan persaingan politik yang sejalan dengan dengan *public choice theory*. Kepala daerah petahana (*incumbent*) berpengaruh positif pada *earnings management* dengan proksi *discretionary accruals* (Cohen et al., 2019). Juga didukung (Donatella, 2020) dengan menyatakan probabilitas penyesuaian kinerja keuangan meningkat dengan persaingan politik jika ada pemerintahan mayoritas.

Penelitian ini menguji pengaruh masa jabatan periode kedua baik setelah terpilih maupun saat mencalonkan diri untuk periode kedua setiap kepala daerah atau yang sering disebut petahana (*incumbent*) terhadap *discretionary accruals*. Hipotesis ini didasarkan pada fakta yang sudah dijabarkan diatas. Oleh karena itu, kepala daerah

petahana (*incumbent*) berada dalam posisi yang lebih mungkin untuk dapat melakukan praktik *discretionary accruals*. Dengan dasar penjelasan tersebut, maka dapat diformulasikan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H1: Kepala daerah petahana (*incumbent*) berpengaruh positif terhadap praktik *discretionary accruals*.**

#### **2.4.2 Pengaruh Tahun Pilkada Terhadap *Discretionary Accruals***

Pemilu dapat menjadi motif politisi untuk berperilaku oportunistik (García-Sánchez et al., 2014). Kepala daerah petahana (*incumbent*) tentu saja berusaha menunjukkan hasil keuangan yang sesuai dengan harapan publik. Hal ini ditujukan tidak semata untuk kepentingan publik melainkan agar kepala daerah tersebut dipilih kembali. Di tahun-tahun politik ini, lawan politik juga berusaha menjatuhkan petahana dengan menggunakan informasi akuntansi (Guarini, 2016). Penggunaan informasi akuntansi sebagai isu yang berhubungan dengan pelaksanaan kekuasaan politik dalam kasus dimana partai/ideologi politik dalam jabatan (kepala daerah) berubah. Informasi akuntansi berperan dalam menyediakan amunisi untuk menyalahkan lawan politik dan untuk mencapai tujuan tertentu.

Penelitian terdahulu oleh (Cohen et al., 2019) menyatakan tahun pemilihan dan pra-pemilihan berpengaruh terhadap *discretionary accruals* yang merupakan proksi *earnings management*. Sejalan dengan Cohen, (Ferreira et al., 2020) menyatakan bahwa pada tahun pra-pemilu *earnings management* sangat tinggi karena konfrontasi politik yang kuat. Khususnya selama pemilihan, politisi mungkin mengabaikan aturan akuntansi untuk mencapai tujuan politik tertentu (Guarini,

2016). Serta pada tahun politik, penyesuaian kinerja keuangan akan meningkat dengan persaingan politik. Persaingan antara partai yang memerintah dan oposisi menjadi pendorong penyesuaian ini (Donatella, 2020) yang mana ini terjadi pada tahun pilkada.

Penelitian ini menguji pengaruh tahun pemilihan kepala daerah (pilkada) terhadap *discretionary accruals*. Dimana pada tahun politik ini, persaingan politik menjadi lebih ketat dan informasi akuntansi menjadi salah satu bagian (amunisi) yang digunakan lawan politik ataupun petahana. Hipotesis ini didasarkan pada fakta bahwa persaingan politik yang ketat akan membuat pemerintah daerah terutama kepala daerah petahana (*incumbent*) melakukan *discretionary accruals* untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan dasar penjelasan tersebut, maka dapat diformulasikan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H2: Tahun pilkada berpengaruh positif terhadap praktik *discretionary accruals*.**

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengembangkan model matematis dengan data berupa angka dari laporan keuangan yang merupakan penelitian kuantitatif untuk melihat angka *discretionary accruals*. Dokumen yang digunakan merupakan dokumen resmi sebagai sumber data sekunder yaitu LKPD untuk provinsi se-Indonesia. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi seperti mencatat dan mengumpulkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang didapat melalui portal resmi <https://e-ppid.bpk.go.id/>.

#### 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Pemerintah provinsi yang melakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 merupakan populasi pada penelitian ini. Terdapat 33 provinsi yang melakukan pilkada dengan waktu yang berbeda-beda. Metode *purposive sampling*, salah satu metode pengambilan sampel non-random dimana peneliti memilih sampel dengan menentukan karakteristik khusus yang sesuai digunakan pada penelitian ini. Teknik ini digunakan dengan harapan permasalahan penelitian dapat terjawab.

**Tabel 3.1 Pemilihan Kepala Daerah Provinsi di Indonesia**

No.	Provinsi	Tahun Pilkada				
		2015	2017	2018	2020	2024 (akan datang)
1	Aceh		✓			✓
2	Sumatera Utara			✓		✓
3	Sumatera Selatan			✓		✓
4	Sumatera Barat	✓			✓	✓

5	Bengkulu	✓			✓	✓
6	Riau			✓		✓
7	Kepulauan Riau	✓			✓	✓
8	Jambi	✓			✓	✓
9	Lampung			✓		✓
10	Bangka Belitung		✓			✓
11	Kalimantan Barat			✓		✓
12	Kalimantan Timur			✓		✓
13	Kalimantan Selatan	✓			✓	✓
14	Kalimantan Tengah	✓			✓	✓
15	Kalimantan Utara	✓			✓	✓
16	Banten		✓			✓
17	DKI Jakarta		✓			✓
18	Jawa Barat			✓		✓
19	Jawa Tengah			✓		✓
20	DI Yogyakarta					
21	Jawa Timur			✓		✓
22	Bali			✓		✓
23	Nusa Tenggara Timur			✓		✓
24	Nusa Tenggara Barat			✓		✓
25	Gorontalo		✓			✓
26	Sulawesi Barat		✓			✓
27	Sulawesi Tengah	✓			✓	✓
28	Sulawesi Utara	✓			✓	✓
29	Sulawesi Tenggara			✓		✓
30	Sulawesi Selatan			✓		✓
31	Maluku Utara			✓		✓
32	Maluku			✓		✓
33	Papua Barat		✓			✓
34	Papua			✓		✓
35	Papua Tengah					✓
36	Papua Pegunungan					✓
37	Papua Selatan					✓
38	Papua Barat Daya					✓
Total		9	7	17	9	37

Sumber: Data diolah (2023)

Ciri-ciri khusus yang ditetapkan tersebut adalah Pemerintah Provinsi yang melakukan pilkada serentak sejak tahun 2015-2020. Penelitian ini menggunakan sampel 33 entitas Provinsi yang berkriteria sebagaimana disebutkan sebelumnya dengan total 198 objek pengamatan.

### 3.3 Definisi Variabel

#### 3.3.1 Variabel Terikat (Y)

*Discretionary Accruals* (DA) merupakan *dependent variable* (variabel terikat) pada penelitian ini. DA berarti kebijakan akuntansi dengan keleluasaan yang diberikan kepada manajemen dalam mengukur kuantitas transaksi akrual secara bebas atau fleksibel. Praktik *discretionary accruals* sendiri adalah upaya pengelolaan angka akuntansi yang dilakukan agar angka surplus/defisit mendekati nol dimana surplus/defisit (yang telah dikelola) dikurangi pendapatan sebelum dikelola (Pellicer et al., 2016). Pengelolaan akuntansi ini ditandai dengan adanya akrual yang tidak normal (Gamayuni, 2022). Di Indonesia, ini disebut SiLPA/SiKPA dimana jika surplus, maka angka akuntansi positif sedangkan jika defisit maka akuntansi negatif. Hal ini kemudian dikelola agar angka surplus/defisit mendekati nol (Ferreira et al., 2020).

#### 3.3.2 Variabel Bebas (X)

Faktor Politik digunakan sebagai variabel bebas (*independent variable*) yang dilihat dari kepala daerah petahana (*incumbent*), tahun pilkada dan ukuran legislatif. Kepala daerah petahana (*incumbent*) yang dimaksud pada penelitian ini adalah kepala daerah provinsi atau yang disebut gubernur. Variabel kepala daerah petahana (*incumbent*) diproksikan dengan menggunakan variabel *dummy* yang akan diberi skor 1 pemerintah daerah dengan kepala daerah petahana (*incumbent*) yang dipilih kembali (sudah menjabat dua periode) dan mencalonkan diri (untuk kedua kalinya) jika provinsi tersebut melakukan pilkada pada tahun bersangkutan dan akan diberi

skor 0 pemerintah daerah dengan kepala daerah yang baru pertama kali dipilih (menjabat) dan tidak ada petahana yang mencalonkan diri jika pilkada.

Tahun pilkada yang dimaksud pada penelitian ini adalah tahun pemilihan kepala daerah yaitu pemerintah provinsi yang melakukan pilkada pada tahun yang bersangkutan. Pemerintah provinsi di Indonesia melaksanakan pilkada serentak namun bervariasi. Artinya, dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia saat ini, sejauh ini belum pernah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara bersama-sama dalam tahun yang sama dan baru akan dilakukan pada tahun 2024. Untuk tahun pilkada akan diberikan skor 1 jika provinsi tersebut melakukan pilkada pada tahun itu dan skor 0 untuk provinsi yang tidak melakukan pilkada pada tahun yang sama.

### 3.4 Pengukuran Variabel

**Tabel 3.2 Pengukuran Variabel**

Variabel		Pengukuran
Faktor Politik (X)	Kepala Daerah Petahana (X1)	<i>Dummy Variable</i> 1 = Kepala daerah petahana ( <i>incumbent</i> ) yang sudah menjabat dua kali dan petahana yang mencalonkan diri kembali pada tahun tersebut. 0 = Petahana periode 1 dan tidak ada petahana yang mencalonkan diri pada pemilihan di tahun tersebut.
	Tahun Pilkada (X2)	<i>Dummy Variable</i> 1 = Provinsi yang melakukan Pilkada pada tahun tersebut 0 = Provinsi yang tidak melakukan Pilkada pada tahun tersebut

X1 & X2 (Cohen et al., 2019)		
<i>Discretionary Accruals</i> (Y)	a. Mengukur total akrual	$TA_{i,t} = EXBI_{i,t} - CFO_{i,t}$ <p>Dimana:</p> <p><math>TA_{i,t}</math> : Total akrual tahun t daerah i</p> <p><math>EXBI_{i,t}</math> : Laba sebelum pos luar biasa (<i>earnings before extraordinary items</i>) pada tahun t untuk daerah i</p> <p><math>CFO_{i,t}</math> : Arus kas operasional tahun t daerah i.</p>
	b. Menghitung nilai akrual yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS ( <i>Ordinary Least Square</i> ) model Jones	$\frac{TA_{i,t}}{A_{i,t-1}} = \alpha_1 \left( \frac{1}{A_{i,t-1}} \right) + \beta_1 \left( \frac{\Delta REV_{i,t}}{A_{i,t-1}} - \frac{\Delta REC_{i,t}}{A_{i,t-1}} \right) + \beta_2 \left( \frac{PPE_{i,t} - Tanah}{A_{i,t-1}} \right) + e$ <p>Dimana:</p> <p><math>TA_{i,t}</math> : Total akrual tahun t daerah i</p> <p><math>A_{i,t-1}</math> : Total aset tahun sebelumnya</p> <p><math>\Delta REV_{i,t}</math> : Pendapatan tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1 daerah i</p> <p><math>\Delta REC_{i,t}</math> : Piutang tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1 untuk daerah i</p> <p><math>PPE_{i,t}</math> : Aset tetap (PPE) tahun t daerah i</p> <p><math>e</math> : <i>Error term</i></p> <p><math>\alpha</math> : Koefisien regresi</p>
	c. Menghitung <i>non-discretionary accruals</i>	$NDA_{i,t} = \alpha_1 \left( \frac{1}{A_{i,t-1}} \right) + \beta_1 \left( \frac{\Delta REV_{i,t}}{A_{i,t-1}} - \frac{\Delta REC_{i,t}}{A_{i,t-1}} \right) + \beta_2 \left( \frac{PPE_{i,t} - Tanah}{A_{i,t-1}} \right)$ <p>Dimana:</p> <p><math>NDA_{i,t}</math> : <i>non-discretionary accruals</i> tahun t daerah i</p> <p><math>A_{i,t-1}</math> : Total aset t-1</p>

		<p><math>\Delta REV_{i,t}</math> : Pendapatan tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1 daerah i</p> <p><math>\Delta REC_{i,t}</math> : Piutang pada tahun t dikurangi pendapatan pada tahun t-1 untuk daerah i</p> <p><math>PPE_{i,t}</math> : Aset tetap (PPE) tahun t daerah i</p> <p><math>\beta</math> : Koefisien regresi</p>
	d. Menghitung <i>discretionary accruals</i>	$DA_{i,t} = \frac{TA_{i,t} \mathbf{1}}{A_{i,t-1}} - NDA_{i,t}$ <p>Dimana:</p> <p><math>DA_{i,t}</math> : <i>discretionary accruals</i> tahun t daerah i</p> <p><math>NDA_{i,t}</math> : <i>non-discretionary accruals</i> tahun t daerah i</p> <p><math>A_{i,t-1}</math> : Total aset tahun sebelumnya</p>
Model <i>Modified Jones</i> yang dipakai oleh Cohen et al. (2019) dan Gamayuni (2022).		

Sumber : Dari berbagai jurnal (2023)

Pengukuran variabel Y (*dependent variable*) membutuhkan perhitungan yang cukup mendalam, dimana hal ini akan memberikan jawaban mengenai adanya praktik *discretionary accruals* pada pemerintah daerah di Indonesia. *Discretionary accruals* sendiri memiliki arti kebijakan dalam akuntansi yang memberi sebuah keleluasan kepada manajemen pemerintah daerah dalam menyesuaikan angka akuntansi agar surplus/defisit mendekati nol. Adanya akrual yang tidak normal akan menjadi jawaban untuk rumusan masalah pertama yang terdapat pada penelitian ini untuk kemudian diteliti apakah faktor politik mempengaruhi adanya praktik *discretionary accruals* yang terjadi.

### 3.5 Metode Analisis Data

#### 3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Metode deskriptif yang menyajikan detail tentang data dalam penelitian. Analisis statistik berguna dalam menganalisis penilaian umum atas masing-masing variabel penelitian. Penggunaan analisis ini terbatas pada penyajian dan evaluasi data disertai perhitungan. Perhitungan dilakukan sebagai bentuk memperjelas keadaan ataupun karakteristik pada data bersangkutan mencakup data minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) serta nilai deviasi standar (Ghozali, 2016) sebagaimana gambaran umum.

Untuk menjawab dan membuktikan adanya praktik *discretionary accruals* pada pemerintah daerah di Indonesia maka dapat dilihat pada nilai *discretionary accruals*. Jika terdapat nilai *discretionary accruals* setelah perhitungan menggunakan modified Jones, maka dapat dipastikan praktik *discretionary accruals* terjadi pada pemerintah daerah tersebut. *Discretionary accruals* ditandai dengan akrual yang tidak normal dan dipengaruhi oleh faktor-faktor penentu diantaranya faktor politik pada pemerintah daerah.

#### 3.5.2 Metode Pemilihan Model

Dalam menentukan jenis model, digunakan uji Chow dan uji Hausman yang menjadi dasar penggunaan analisis panel. Digunakan Uji Chow dengan tujuan menentukan penggunaan model *Common Effect* atau model *Fixed Effect*. Penetapan penggunaan uji diambil dengan menolak  $H_0$  jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau jika nilai Probabilitas (Probability)  $< \alpha$ . Kesimpulan dari penolakan  $H_0$  adalah bahwa Model *Fixed Effect* lebih baik daripada Model *Common Effect*.

Dalam penentuan model *Fixed Effect* atau model *Random Effect* digunakan Uji Hausman. Dengan hipotesis sebagai berikut:

REM yang tepat sebagai model :  $H_0 : E(\tau_i | x_{it}) = 0$

FEM yang tepat sebagai model :  $H_1 : E(\tau_i | x_{it}) \neq 0$

Keputusan untuk menolak  $H_0$  diambil dengan melihat perbandingan statistik  $\chi^2$ .

Jika  $\chi^2$  hitung  $>$   $\chi^2$  tabel, maka  $H_0$  ditolak, dan penggunaan model yang tepat adalah *Fixed Effect*. Atau jika hasilnya sebaliknya, *Random Effect* akan digunakan.

### 3.5.3 Uji Spearman dan Pearson

Uji pearson adalah metode yang digunakan untuk menguji tingkat korelasi dengan menghitung koefisien korelasi Pearson ( $r$ ) linier antara dua variabel. Sedangkan uji spearman adalah metode yang digunakan untuk menguji korelasi peringkat (*rank*) dengan menghitung koefisien korelasi Spearman ( $r_s$ ). Namun begitu, uji Pearson dan Spearman tetaplah berbeda. Selain jenis korelasi yang diuji, perbedaan lainnya adalah uji Pearson memerlukan asumsi distribusi normal. Jadi, jika variabel yang diuji tidak memenuhi asumsi distribusi normal maka uji Spearman digunakan.

Dalam beberapa kasus meskipun data yang digunakan sama, kedua uji ini dapat memberikan data yang berbeda. Kendati begitu, metode ini tetap bisa dipakai bersama-sama untuk menguji korelasi antara dua variabel. Uji Pearson mencari hubungan linier yang kuat antara dua variabel dan Uji Spearman mencari hubungan antara dua variabel tanpa memperhatikan skala numerik dari variabel tersebut. Hal ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara dua variabel ini apabila data memenuhi asumsi distribusi normal.

### 3.5.4 Analisis Regresi Data Panel

Digunakan metode analisis data panel (*pooled data*) pada penelitian ini untuk menguji dampak *independent variable* pada *dependent variable*. Data panel (*pooled data*) merupakan analisis yang mengkombinasikan deret waktu atau *time series* dengan kerat lintang atau *cross section*. Gujarati dan Porter (2012) menjelaskan model *cross section* dapat ditulis dengan seperti ini:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + e_i; i = 1, 2, \dots \dots N$$

Dimana N merupakan jumlah data *cross-section*, sedangkan model *time-series* adalah:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + e_i; t = 1, 2, \dots \dots T$$

Dimana T adalah jumlah data *time-series*. Dikarenakan data panel adalah gabungan dari kedua model (*cross section* dan *time-series*), maka modelnya adalah:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{it} + \mu_{it}; i = 1, 2, \dots \dots N; t = 1, 2, \dots \dots T$$

Dimana :

N = jumlah banyak observasi

T = jumlah banyak waktu

N × T = jumlah banyak data panel

Maka model untuk penelitian ini adalah:

$$DA_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 election_{it} + \beta_2 election\_year_{it} + \mu_{it}$$

Dimana:

$DA_{i,t}$  : *Discretionary Accruals* pada tahun t untuk daerah i

***election*** : *dummy variable* dimana skor 1 untuk kepala daerah petahana yang mencalonkan diri kembali dan atau yang sudah menjabat dua periode dan skor 0 untuk kepala daerah periode pertama dan tidak ada calon petahana pada daerah yang melakukan pilkada pada tahun  $t$  untuk daerah  $i$

***election\_year*** : *dummy variable* dimana skor 1 untuk daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah dan skor 0 daerah yang tidak melakukan pemilihan kepala daerah pada tahun  $t$  untuk daerah  $i$

**$\beta_0$**  : Konstanta

**$\beta_1 - \beta_2$**  : Koefisien Regresi

**$\mu_{it}$**  : *Error term* pada tahun  $t$  untuk daerah  $i$

Tiga macam analisis regresi data panel :

1. *Common Effect Model* (CEM)

Model sederhana yang mengintegrasikan semua data *time series* dengan data *cross section*, setelah itu dilakukan estimasi OLS (*Ordinary Least Square*). *Common Effect Model* mengasumsikan intersep dan kemiringan (slope) dari setiap variabel sama. Berlaku untuk semua entitas variasi. Atau hasil regresi dalam pengertian lain diasumsikan berlaku pada semua provinsi di semua waktu. Kelemahan dari model ini adalah karena perbedaan model dengan realitas (situasi sebenarnya).

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Model ini menyimpulkan bahwa perbedaan dasar antara individu dapat diatasi melalui variasi dari intersep, tetapi intersep antarwaktu adalah konstan (*time invariant*). Koefisien regresi tetap antarindividu dan antarwaktu merupakan

maksud daripada *fixed effect*. Intersep (nilai awal) untuk tiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan dikalkulasi serta dengan memasukan *dummy variable* pada umumnya.

### 3. *Random Effect Model* (REM)

Sebagai upaya menanggulangi kelemahan model *Fixed Effect* maka REM digunakan. Dimana *dummy variable* digunakan. Model ini menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antarindividu yang karenanya, model ini mengasumsikan setiap individu memiliki perbedaan intersep yang adalah *random variable*. Penggunaanya akan menyebabkan model diragukan serta mengurangi derajat bebas (*degree of freedom*). Hal ini akan mengurangi efektivitas atau kinerja dari parameter yang dikalkulasi.

### 3.5.5 Uji Hipotesis

Pada penelitian ini terdapat tiga pengujian model regresi yang perlu dilakukan, ketiganya adalah uji statistik T, uji statistik F serta koefisien determinasi atau *R-Squared* ( $R^2$ ).

#### 1. Uji Statistik T (Uji signifikansi parameter individual)

Uji t dilakukan untuk mengestimasi koefisien regresi masing-masing variabel independen. Dengan demikian, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui. Pengujian dari Uji T disimpulkan dengan apabila probabilitas t hitung  $> \alpha$ , ini mengindikasikan bahwa variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, dan sebaliknya.

## 2. Uji Statistik F (Uji signifikansi)

Selanjutnya, uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Apabila *probability* F hitung  $< \alpha$  berarti variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat.

## 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Setelah itu, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang dipakai untuk menghitung sejauh mana keragaman semua variabel independen yang menjelaskan variabel dependen.

Dimana nilai koefisien determinasi ini berada antara 0 dan ( $0 < R < 1$ ).

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat praktik *discretionary accruals* pada pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu juga untuk memperoleh bukti empiris bahwa faktor politik mempengaruhi pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan praktik *discretionary accruals*. Analisis data panel REM digunakan pada penelitian ini sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis dengan menggunakan *software Eviews 10*. Dengan hasil uji hipotesis variabel Kepala Daerah Petahana (*Incumbent*) dan Tahun Pilkada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepala Daerah Petahana (*Incumbent*) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *discretionary accruals* pada pemerintah daerah provinsi yang ada di Indonesia. Jadi, *discretionary accruals* pada pemerintah daerah dengan kepala daerah petahana (*incumbent*) lebih tinggi dibandingkan pada daerah dengan kepala daerah yang baru pertama kali dipilih. Semakin banyak kepala daerah petahana provinsi di Indonesia maka *discretionary accruals* semakin meningkat.
2. Tahun Pilkada tidak memiliki pengaruh terhadap *discretionary accruals* pada pemda provinsi di Indonesia sehingga  $H_0$  tidak ditolak. Kenaikan/penurunan *discretionary accruals* yang ada pada pemda provinsi di Indonesia tidak dipengaruhi oleh tahun pilkada.
3. Kenaikan dan penurunan DA ini terbukti pada angka DA yang diketahui setelah uji yang dilakukan. Sebagai contoh, pada Provinsi Nangroe Aceh

Darussalam, terdapat angka DA yang cukup rendah pada tahun Pilkada dibandingkan tahun lainnya dan DA mengalami peningkatan saat *incumbent* terpilih dan menjabat kembali. Hal ini membuktikan bahwa DA tidak dipengaruhi tahun pilkada namun *incumbent* yang menjabat dua periode terbukti meningkatkan angka DA.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini terletak pada angka  $R^2$  yang hanya sebesar 2,9% dimana ini berarti faktor politik yang di proksikan dengan kepala daerah petahana dan tahun pilkada hanya menjelaskan sebesar 2,9% dari *Discretionary Accruals* sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Selain itu alpha sebesar 10% yang digunakan sebagai tingkat kesalahan (*error*) juga menandakan adanya bias yang tinggi. Disamping itu, faktor Politik terbatas pada kepala daerah petahana dan tahun pilkada. Meskipun sudah menggambarkan faktor politik namun berdasarkan hasil pengujian statistik hanya variabel kepala daerah petahana (*incumbent*) yang memberikan pengaruh terhadap *discretionary accruals*. Keterbatasan lainnya adalah dalam penggunaan sampel *incumbent* yang terlalu bias apabila 5 tahun jabatan *incumbent* di periode kedua digunakan semua pada sampel penelitian sedangkan hasil uji menandakan bahwa tahun pilkada tidak berpengaruh terhadap *discretionary accruals*.

## 5.3 Saran

Dengan penelitian yang telah dilaksanakan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, pengambilan sampel disarankan untuk menambah jumlah dan periode (tahun) sampel atau mengganti sampel menggunakan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia terutama pada tahun 2024 mendatang akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak ataupun dapat menggunakan sampel negara lain. Selain itu, dapat menggunakan variabel lain selain faktor politik yang lebih bisa menjelaskan *discretionary accruals*. Error yang digunakan juga dapat ditingkatkan menjadi 5% dan untuk penggunaan sampel kepala daerah petahana, baiknya hanya dilakukan pengujian pada tahun pemilihan, pra-pemilihan dan post-pemilihan. Hal ini bertujuan untuk hasil penelitian yang lebih komprehensif dalam menggambarkan kenaikan/penurunan atau bahkan keterkaitannya dengan *discretionary accruals* itu sendiri.
2. Bagi pemerintah, diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan, mengingat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah salah satu indikator kinerja pada pemerintah yang dapat dipantau oleh masyarakat dan akademisi. Kemudian mengoptimalkan kebijakan-kebijakan terkait agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kedepannya
3. Terkhusus bagi Universitas Lampung sebagai institusi/lembaga pendidikan diharapkan dapat menambah referensi. Baik jurnal penelitian maupun buku terbaru. Pengadaan buku ataupun jurnal secara fisik maupun dalam jaringan sebagai tindakan untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan informasi untuk penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2012). Perilaku oportunistik legislatif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya: bukti empiris dari penganggaran pemerintah daerah di Indonesia. *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Afiqoh, N.W. (2020). *APPLICATION OF ACCRUAL-BASED GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS AND OBTAINING FAIR OPINIONS WITHOUT EXCEPTIONS*. *Jurnal Akademi Akuntansi*.
- Abdullah, S., Mirza, K., Junita, A., & Meutia, T. (2021). JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia URL : <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index> *Parliament Oversight on Local Parliament Oversight on Local Government Financial Management an Government Financial Management an Empirical Evidence Empir*.
- Anessi-Pessina, E., & Sicilia, M. (2020). *Do top managers' individual characteristics affect accounting manipulation in the public sector?* *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(3), 465–484. <https://doi.org/10.1093/jopart/muz038>
- Arcas, M. J., & Martí, C. (2016). *Financial Performance Adjustment in English Local Governments*. *Australian Accounting Review*, 26(2), 141–152. <https://doi.org/10.1111/auar.12094>
- ARIFIANI, H., PAYAMTA, & SUTARYO. (2013). Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Banten). *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 220. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.270>
- Beck, A. W. (2018). *Opportunistic financial reporting around municipal bond issues*. *Review of Accounting Studies*, 23(3), 785–826. <https://doi.org/10.1007/s11142-018-9454-2>
- Bisogno, M., & Donatella, P. (2021). *Earnings management in public-sector organizations: a structured literature review*. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 34(6), 1–25. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-03-2021-0035>
- Boyne, G. A. (1997). *Public choice theory and local government structure: An*

- evaluation of reorganisation in Scotland and Wales. Local Government Studies*, 23(3), 56–72. <https://doi.org/10.1080/03003939708433876>
- Buchanan, James M., Tullock, Gordon (1962). *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*.
- Cohen, S. (2012). *Cash versus accrual accounting measures in Greek municipalities: Proxies or not for decision-making? International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 8(3), 203–222. <https://doi.org/10.1504/IJAPE.2012.047807>
- Cohen, S., Bisogno, M., & Malkogianni, I. (2019). *Earnings management in local governments: the role of political factors. Journal of Applied Accounting Research*, 20(3), 331–348. <https://doi.org/10.1108/JAAR-10-2018-0162>
- Dechow, P., Ge, W., & Schrand, C. (2010). *Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 344–401. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.001>
- Dharma, F. (2023). *Regional Heads' Discretionary Spending in Local Election. WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS*. <https://doi.org/10.37394/23207.2023.20.105>
- Dharma, F., Akhmad Syakhroza & Dwi Martani. (2022). *Does the Local Assistance Budget Realization Affect Incumbents' Votes? (Study in Indonesia Local Election). International Journal of Professional Business Review*. Miami, v.7.n.6.p.01-16.
- Donatella, P. (2020). *Is political competition a driver of financial performance adjustments? An examination of Swedish municipalities. Public Money and Management*, 40(2), 122–130. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1667684>
- Donatella, P., & Tagesson, T. (2021). *CFO characteristics and opportunistic accounting choice in public sector organizations. Journal of Management and Governance*, 25(2), 509–534. <https://doi.org/10.1007/s10997-020-09521-1>
- Ferreira, A., Carvalho, J., & Pinho, F. (2013). *Earnings Management Around Zero: A motivation to local politician signalling competence. Public Management Review*, 15(5), 657–686. <https://doi.org/10.1080/14719037.2012.707679>

- Ferreira, A., Carvalho, J., & Pinho, F. (2020). *Political competition as a motivation for earnings management close to zero: the case of Portuguese municipalities*. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(3), 461–485. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-10-2018-0109>
- Gamayuni, R. R. (2022). *MOTIVATION AND ABNORMAL ACCRUAL CHARACTERISTICS ON FINANCIAL STATEMENTS OF LOCAL GOVERNMENTS*. 19(2), 969–991.
- García-Sánchez, I. M., Mordán, N., & Cuadrado-Ballesteros, B. (2014). *Do electoral cycles affect local financial health? Policy Studies*, 35(6), 533–556. <https://doi.org/10.1080/01442872.2014.971727>
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23 (Edisi 8) ( Cetakan ke VIII ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goodhue, Dale., William Lewis & Ronald Thompson. 2007. *Statistical Power in Analyzing Interaction Effects: Questioning the Advantages of PLS with Product Indicators*. 18(2), pp. 211–227. Information Systems Research.
- Guarini, E. (2016). *The day after: newly-elected politicians and the use of accounting information*. *Public Money and Management*, 36(7), 499–506. <https://doi.org/10.1080/09540962.2016.1237135>
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani., Darwanis., Abdullah, S. (2022). “DETERMINAN MANIPULASI AKRUAL DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.” *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan.*, 12(2), 275–291. <https://doi.org/10.1093/nq/s1-ix.228.217a>
- Hyndman, N., & Connolly, C. (2011). *Accruals accounting in the public sector: A road not always taken*. *Management Accounting Research*, 22(1), 36–45. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2010.10.008>
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara RI Tahun 2016. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 1999. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 60. Lembaran Negara RI Tahun 2014. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 1999. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Jakarta.
- Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010. Jakarta.
- Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217 Tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Jakarta.
- Jansen, E. P. (2008). *New Public Management: Perspectives on Performance and the Use of Performance Information. Financial Accountability and Management*, 24(2), 169–191. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2008.00447.x>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976) *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Jones, J. (1991), “*Earnings management during import relief investigations*”, *Journal of Accounting Research*, Vol. 29 No. 2, pp. 193-228.
- Jones, M. (2011), *Creative Accounting, Fraud and International Accounting Scandals*, John Wiley & Sons, London.
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (*The Influence of Size, Prosperity, Legislative Size, Leverage on Regional Government Financial Performance in Indonesia*). *Accounting Analysis*

*Journal*, 1(1), 27–35.

- Lapsley, I., Mussari, R., & Paulsson, G. (2009). *On the adoption of accrual accounting in the public sector: A self-evident and problematic reform*. *European Accounting Review*, 18(4), 719–723. <https://doi.org/10.1080/09638180903334960>
- Maher, M. W., & Keller, E. C. (1979). *An Analysis of Reporting Practices American Cities Working Paper*. No. 169. Universitas Michigan.
- Pellicer, M. J. A., Hodges, R., & Marti, C. (2016). *Earnings Management in English Local Governments: Determing factors and instruments*. *Financial Accountability & Management*, 17463, 1–21.
- Pilcher, R. (2011). *Local governmental management of discretionary and specific accruals*. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 7(1–2), 32–60. <https://doi.org/10.1504/IJAPE.2011.037725>
- Pina, V., Arcas, M. J., & Martí, C. (2012). *Accruals and “accounting numbers management” in UK executive agencies*. *Public Money and Management*, 32(4), 273–280. <https://doi.org/10.1080/09540962.2012.691306>
- Priyatno, Duwi. (2012). *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Putri, M. V., Gamayuni, R. R., Komaruddin, K., & Dharma, F. (2021). Analisis Pendapatan Berbasis Kas Dan Berbasis AkruaL Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(2), 75–86. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i2.263>
- Rivenbark, W., & Roenigk, D. (2011). Implementation of Financial Condition Analysis in Local Government. *Public Administration Quarterly*, 35(2), 241.
- Rohman, A. (2016). Analisis Kebijakan Diskresi AkruaL terhadap Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 10(1), 1–24. <https://core.ac.uk/download/pdf/267824030.pdf>
- Rohman, A. ., Daud, R., & Ubaidillah. (2018). KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PENDAHULUAN Pengelolaan keuangan pemerintah telah banyak mengalami perubahan dari berbagai perspektif dan ruang lingkungnya . Siklus pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan , penganggaran , pelaksanaan

dan pelaporan serta per. *ANALISIS PENGARUH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN, DISKRESI AKRUAL DAN TINGKATAN AKRUAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH*, 11(3), 486–512.

Rohman, A., Daud, R., & Ubaidillah. (2019). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PENDAHULUAN* *Pengelolaan keuangan pemerintah telah banyak mengalami perubahan dari berbagai perspektif dan ruang lingkungannya . Siklus pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan , penganggaran , pela.* 12(April), 29–50. <https://doi.org/10.22441/profita.2019>.

Schipper, K. (1989) Commentary on Earnings Management. *Accounting Horizons*, 3, 91-102.

Sugiyono. 2003. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.

Sunyoto, Danang. 2016. *Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service)

Vinnari, E. M., & Näsi, S. (2008). *Creative Accrual Accounting in the Public Sector: ‘Milking’ Water Utilities To Balance Municipal Budgets and Accounts*. *Financial Accountability and Management*, 24(2), 97–116. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2008.00448.x>

Walker, M. (2013). *How far can we trust earnings numbers? What research tells us about earnings management*. *Accounting and Business Research*, 43(4), 445–481. <https://doi.org/10.1080/00014788.2013.785823>

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). *a Positive Standards Theory of the Determination of Accounting*. 53(1), 112–134.

Zimmerman, J. L. (1977). *Discussion of The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives*. *Journal of Accounting Research*, 15(1977), 145. <https://doi.org/10.2307/2490637>